

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Kita sering mendengar bahkan mengucapkan istilah pembelajaran, sehingga kata pembelajaran sudah bukan hal asing bagi semua orang. Berbicara mengenai pembelajaran adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah berakhir dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang akan terjadi dari masa ke masa.

Menurut Ngalimun (2017: 44) kata pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru dan siswa sehingga akan terjadi proses belajar dalam arti akan adanya perubahan perilaku individu siswa itu sendiri.

Selanjutnya adalah pembelajaran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pembelajaran merupakan

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Menurut Rivai (2009: 203) belajar terjadi pada waktu pengalaman menghasilkan perubahan terhadap perilaku atau pengetahuan seseorang atau individu. Tiga teori umum dari pembelajaran adalah :

1. Teori yang berhubungan dengan perilaku mempelajari penelitian yang berubah dalam hal kelakuan
2. Teori yang berhubungan dengan kesadaran yang mempelajari tentang nilai rendah seperti aktivitas dalam, yaitu berpikir, mengingat, menrangkai dan memecahkan masalah
3. Teori yang berhubungan dengan kegunaan yang berguna untuk mempelajari bagaimana individu membuat dan menghasilkan suatu aktivitas.

Sedangkan menurut (Udin S Winataputra(Ngalimun 2017: 44)) pembelajaran merupakan proses membuat individu atau orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Lebih lanjutnya lagi ia mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sarana yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar yang dalam arti dapat merubah perilaku individu dari proses yang telah dialami dan sesuatu yang diciptakan dalam rancangan pembelajaran.

Dari pemaparan mengenai pengertian pembelajaran maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar yang berlangsung pada lingkungan belajar yang kemudian menghasilkan perubahan - perubahan terhadap perilaku dan pengetahuan individu.

b. Tujuan pembelajaran

Seperti yang kita ketahui bahwa bicara tentang pembelajaran adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak akan berakhir, hal tersebut dapat terjadi karena pembelajaran akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari sesuatu yang telah dilaksanakan. Menurut Ngalimun (2017:59) dalam kegiatan pembelajaran tujuan merupakan suatu cita-cita yang hendak dicapai atau dengan kata lain adalah sebagai rumusan keinginan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut.

Dalam pembelajaran adapun fungsi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pusat perhatian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut
2. Sebagai penentu arah kegiatan pembelajaran itu sendiri
3. Sebagai tiik pusat dan pedoman dalam penyusunan rencana pembelajaran
4. Sebagai pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan kegiatan pembelajaran.

c. Prinsip-prinsip pembelajaran

Prinsip merupakan asas atau suatu kebenaran yang menjadi pedoman ataupun sebagai dasar orang untuk berfikir dan bertindak. Didalam proses pembelajaran menurut Suprihatiningrum (2017: 99) prinsip-prinsip pembelajaran akan membantu peserta didik dalam berfikir dan memilih tindakan yang paling tepat sehingga peserta didik dapat terhindar dari tindakan yang justru akan merugikan siswa atas pencapaian keberhasilan belajarnya.

Menurut Ngilimun (2017:47) prinsip-prinsip pembelajaran itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan anatar satu dengan lainnya. Menurutnya prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Individualitas

Prinsip yang pertama adalah individualitas yang mana manusia yang hidup memiliki pribadi/ jiwa sendiri. Kekhususan jiwa tersebut menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya.

2. lingkungan / kemasyarakatan

Prinsip ini sangat menentukan integrasi anak dengan lingkungannya. Dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya terbatas pada apa saja yang ada didalam buku atau penjelasan dari pendidik. Banyak hal dan pengalaman baru yang dapat dipelajari dari lingkungan /kemasyarakatan seperti keadaan alam, industri, serta cara hidup

3. Minat

Minat pada dasarnya adalah penerimaan antara diri sendiri dengan sesuatu hal yang ada diluar diri, dalam hal ini maka semakin besar hubungan tersebut maka akan semakin besar minat tersebut.

4. Aktivitas

Pada dasarnya belajar yang berhasil harus melalui berbagai aktivitas fisik maupun psikis. Aktifitas fisik merupakan kegiatan yang nampak dan dapat dilakukan oleh peserta didik, yang meliputi aktivitas fisik adalah:

- a. Giat aktif dengan anggota badan
- b. Membuat sesuatu
- c. Bermain
- d. Bekerja

Sedangkan aktivitas psikis jika jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya dan banyak berfungsi dalam proses pembelajaran secara aktif. Aktivitas psikis meliputi mendengarkan, mengamati, mengingat, menguraikan, menyelidiki dan mengasosiasi.

5. Motivasi

Motivasi pada dasarnya berasal dari kata motif yang berarti kecenderungan hati yang dapat mendorong seseorang atau individu untuk melakukan suatu tindakan.

6. Peragaan

Prinsip peragaan merupakan prinsip yang harus dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran. Setiap guru dalam menyajikan bahan pelajaran diharapkan dapat menggunakan alat peraga untuk membantu dalam proses pembelajaran.

7. Korelasi

Korelasi berarti menghubungkan bahan pelajaran yang satu dengan yang lainnya, misal bahan pelajaran umum dengan pelajaran lain yang umum atau dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan ,penguatan, perbedaan individu.

2. Mata Kuliah Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat dikatakan juga sebagai salah satu indikator untuk melihat maju tidaknya suatu negara, hal tersebut karena pendidikan juga akan berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut.

Manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan warga negara agar menjadi warga negara yang baik adalah salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dapat membentuk sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan serta kepribadian yang berkarakter.

Pada perguruan tinggipun terdapat mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan menjadi warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggung jawab, mata kuliah tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang sekarang berubah nama menjadi mata kuliah kewarganegaraan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mata kuliah kewarganegaraan yang dimaksud adalah

Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Burhan (2016:13) merupakan pendidikan yang mengajarkan bagaimana seseorang agar dapat menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, sebab kewarganegaraan tidak diwariskan begitu saja namun harus dipelajari oleh masing-masing individu.

Sedangkan Menurut Taniredja (2015: 2) mengatakan bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan yang bertujuan agar seseorang mempelajari

tentang orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga seseorang tersebut dapat memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation*, serta kemampuan untuk dapat mengambil keputusan politik secara rasional yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan maka penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang mencakup tentang pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka tunggal ika serta sikap dan perilaku politik sehingga seseorang dapat memiliki pengetahuan politik, partisipasi politik serta kesadaran sebagai warga negara lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa kebangsaan serta cinta tanah air.

a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap sesuatu yang ada atau sesuatu yang diciptakan pasti didalamnya terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai. Suatu tujuan dapat tercapai apabila semua sistem yang ada didalamnya berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Menurut Ditjen Dikti (2016:7) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah pada umumnya bertujuan untuk membentuk setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Karena dapat kita ketahui bahwa negara yang memiliki warga negara yang baik (*good citizen*) dan memiliki kesadaran untuk cinta kepada tanah airnya akan cenderung lebih mudah bagi negara tersebut untuk mencapai tujuannya karena semua komponen yang ada didalam negara termasuk warga negaranya ikut mendukung dan berpartisipasi untuk membangun negara tersebut.

Burhan (2016:15) juga mengatakan bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha untuk membentuk pola peserta didik agar memiliki kesadaran bertanggung jawab dan kesadaran untuk bela negara.
- b. Untuk membentuk warga negara memiliki rasa cinta tanah

- c. Untuk meberikan pengetahuan kepada peserta didik pengetahuan dan tentang hubungan antara warga negara dengan negaranya
- d. Dapat melaksanakan kewajiban dan hak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab
- e. Untuk memahami berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat
- f. Menumbuhkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai cinta tanah air dan patriotisme
- g. Dapat berpikir rasional,kritis, dan kreatif dalam menghadapi maslah isu kewarganegaraan
- h. Dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pemerintahan
- i. Dapat berkembang secara demokratis berdasarkan pada karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan masyarakat lain
- j. Bergabung bersama dengan bangsa-bangsa lain secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari beberapa uraian diatas mengenai tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*)
- b. Menguasi pengetahuan dan pemaha man tentang beragaman masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang beralandaskan pancasila,Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab
- c. Dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur, santun dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara yang terdidik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggung jawab
- d. Untuk membekali peserta didik pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan hubungan warga negara dengan negaranya serta memupuk perilaku cinta tanah air dan patriotisme

- e. Dapat berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan
 - f. Dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- c. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi merupakan suatu tindakan cerdas yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/Dikti/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Burhan (2016:13) kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain adalah agar mahasiswa dapat :

- a. Mahasiswa dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM
- b. Mampu berpartisipasi upaya mencegah berbagai tindakan kekerasan dengan cara yang cerdas ,bijaksana dan damai
- c. Memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi menghadapi konflik dimasyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral , agama dan nilai-nilai universal
- d. Mampu berpikir kritis dan objektif terhadap masalah persoalan tentang kenegaraan HAM dan demokrasi
- e. Mampu memberikan kontribusi terhadap publik terkait dengan konflik yang dihadapi oleh publik
- f. Mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak.

Dari penjelasan mengenai kompetensi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menghadapi berbagai konflik yang ada dalam masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, serta mampu berpikir kritis dan objektif mengenai persoalan tentang kenegaraan, HAM dan demokrasi.

3. Mata kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai negara mengarahkan kepada warganya untuk mendalami nilai-nilai dasar, sejarah dan masa depan bangsa sesuai dengan nilai-nilai fundamental dan ideology yang dianut bangsa yang bersangkutan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Negara Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang dapat berubah sangat cepat. Bagi Muhammadiyah pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dilingkungan pendidikannya pun harus menemukan kembali nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai islam dan keindonesiaan dengan realitas dinamika sosial yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan persoalan-persoalan *cognitive do main (moral knowledge)* semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan moral dan *social action*. Sentuhan moral dan *social action* ini yang harusnya mendapat perhatian yang lebih tinggi, agar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warga yang baik dan bertanggungjawab) sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan pendekatan seperti itu maka perguruan tinggi Muhammadiyah mampu menanamkan *moral and social skill* kepada mahasiswa agar mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, seperti

toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralism, kesadaran hukum, hak asasi manusia, demokratisasi dan tertib sosial.

Menurut Chamim (2010) beberapa agenda penting yang perlu dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah antar lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan nilai-nilai demokratis, yang meliputi keadilan, taat pada hukum, kebebasan berpendapat, keterwakilan dan kesetaraan gender
- b. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas yang antara lain meliputi penghargaan atas hak-hak individual, *local needs*, dan *common good*
- c. Mengembangkan pemerintahan yang bersih diantaranya meliputi partisipasi, hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil,
- d. Pembentukan identitas nasional yang meliputi reorientasi nation building dalam bentuk bhineka tunggal ikadn kebanggaan nasional
- e. Pengembangan ikatan sosial diantaranya meliputi toleransi, dan keadilan sosial
- f. Pengembangan kehidupan pribadi meliputi cenderung tunduk pada kebenaran, tunduk pada hukum, jujur, kesopanan dan tolong menolong
- g. Pengembangan kehidupan ekonomi yang meliputi persaingan sehat, kesejahteraan, kewirausahaan, dan pasar bebas
- h. Pengembangan nilai-nilai keluarga diantaranya meliputi rasa tanggung jawab, dukungan, perlindungan, akhlak, sadar gender dan kebersamaan.

Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Mata Kuliah Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang mana mata kuliah ini wajib diberikan kepada semua mahasiswa. Mata kuliah Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini di ajarkan di seluruh fakultas dan semua program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata kuliah ini Mendiskripsikan tentang kualitas wawasan mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta mengerti problematika bangsa dalam konteks

kehidupan berbangsa dan bernegara di era global, sehingga para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan mampu memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah. Mata kuliah ini, juga diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang mengerti dan mengargai Hak Asasi Manusia, yang mana seseorang adalah sebagai warganegara Indonesia dan sebagai masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis. Mata Kuliah ini, juga memberikan wawasan kewilayahan negara baik sekaligus memberikan wawasan geopolitik dan geostrategi upaya pembangunan segala bidang, serta peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan.

Selanjutnya adalah materi pokok Mata Kuliah Kewarganegaraan berdasarkan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi
 2. Pendidikan Kewarganegaraan dan cita-cita menuju masyarakat madani
 3. Demokrasi
 4. Transformasi nilai-nilai demokrasi dalam keluarga dan masyarakat
 5. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
 6. Pendidikan Anti Korupsi
 7. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
 8. Hak Asasi Manusia
 9. Identitas Nasional
 10. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
 11. Tata Dunia Baru dalam Globalisasi
 12. Ekonomi Kerakyatan dan Etos ekonomi sebagai Basis Kekuatan Nasional
4. Tiga Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang diberikan dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan

karena merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*), dalam pendidikan kewarganegaraan itu sendiri terdapat 3 kompetensi penting atau inti materi yang ada didalamnya yakni *Civic Knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan, *civic skill* atau keterampilan kewarganegaraan dan *civic disposition* atau watak kewarganegaraan. Warga negara harus memiliki 3 komponen tersebut untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Dibawah ini akan diuraikan mengenai 3 kompetensi penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1. *Civic Knowledge*

Civic knowledge merupakan salah satu komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic knowledge* menurut Sunarso (2009:71) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara, dan pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik serta sistem pemerintahan, nilai-nilai universal yang ada dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerjasama dalam mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat internasional.

Dalam hal ini *Civic knowledge* dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Menurut Raharja dkk (2017:203-204) *Civic knowledge* atau Pengetahuan Kewarganegaraan merupakan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan tersebut bersifat mendasar tentang struktur sistem politik sistem pemerintahan dan sistem sosial yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai yang universal dalam kehidupan masyarakat demokratis, serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Dari pemaparan diatas mengenai *Civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Civic knowledge*

merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh warga negara yang berupa materi substansi yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik serta sistem pemerintahan, nilai-nilai universal yang ada dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerjasama dalam mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat global.

2. *Civic skill*

Komponen penting yang kedua dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah *civic skill*. Warga negara harus memiliki 3 komponen tersebut untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Salah satu komponen yang terpenting dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah *Civic skill*. Menurut Burhan (2016:8) *Civic skill* yaitu tentang keterampilan Kewarganegaraan, peran serta dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Menurut Sunarso (2009:71) *Civic skill* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna, dalam *civic skill* tersebut mencakup *intellectual skill* (keterampilan intelektual) dan *participation skill* (keterampilan partisipasi).

Menurut Raharja dkk (2017:204) *civic skill* merupakan pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperolehnya menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat bermanfaat untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari pemaparan tentang *civic skill* diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *civic skill* merupakan suatu kecakapan atau keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang telah didapatkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan agar dapat bermanfaat untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komponen *civic skill* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *intellectual skill* (Keterampilan Intelektual) dan *participation skill* (keterampilan partisipasi)

dibawah ini akan diuraikan mengenai kedua keterampilan yang ada dalam *civic skill* tersebut.

a. *Intellectual skill* (Keterampilan intelektual)

Menurut Winataputra dalam Adnan (2005:72) *intellectual skill* (keterampilan intelektual) penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, bertanggung jawab dan efektif antara lain keterampilan berpikir kritis yang meliputi mengidentifikasi dan medeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat yang berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Dibawah ini merupakan unsur *Intellectual skill* (keterampilan intelektual).

Tabel 2.1 Komponen *intellectual skill*/ Keterampilan intelektual

Unsur Keterampilan Intelektual warga negara	
1.	Mengidentifikasi, dapat dibedakan menjadi :
a.	Membedakan
b.	Mengelompokkan/mengklasifikasikan
c.	Menentukan bahwa sesuatu itu asli
2.	Menggambarkan / memberi uraian atau ilustrasi seperti :
a.	Proses
b.	Lembaga
c.	Fungsi
d.	Alat
e.	Tujuan
f.	Kualitas
3.	Menjelaskan / mengklarifikasi atau menafsirkan seperti :
a.	Sebab- sebab terjadinya peristiwa
b.	Makana dan pentingnya peristiwa atau ide
c.	Alasan bertindak
4.	Menganalisis, seperti kemampuan tentang menguraikan :
a.	Unsur-unsur atau komponen ide, proses politik, institusi-institusi
b.	Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi
c.	Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan dan amana yang merupakan fakta dan pendapat
5.	Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria untuk membuat keputusan tentang

<ul style="list-style-type: none"> a. Kekuatan dan kelemahan issue/pendapat b. Menciptakan pendapat baru <p>6. Mengambil pendapat/posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dari hasil seleksi berbagai posisi b. Membuat pilihan baru <p>7. Mempertahan pendapat/posisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan /diambil/dibela b. Merespon posisi yang telah disepakati
--

Sumber: Cholisin (2010)

Sehingga dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *intellectual skill* (keterampilan intelektual) yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan medeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan atau megambil pendpat/posisi, mempertahankan pendapat/posisi yang berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

b. *Participation skill* (keterampilan partisipasi)

Selanjutnya menurut White (Kosasih, 2016:65) *civic skill* atau Keterampilan Kewaragnegaraan memiliki beberapa indikator yaitu berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan bersama, melakukan aksi dalam hal untuk merubah sistem politik, pemantauan acara-acara publik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, menerapkan keputusan kebijakan dalam masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, berunding dan dapat membuat keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, dan mempengaruhi pembuat kebijakan tentang masalah-masalah masyarakat. Sedangkan keterampilan partisipasi warga negara dapat lihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.2 Komponen *participation skill* / keterampilan partisipasi

Keterampilan partisipasi warga negara
<p>1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanya, menjawab berdiskusi dengan sopan b. Menjelaskan artikulasi kepentingan c. Membangun koalisi, negosiasi, kompromi d. Mencari consensus e. Mengelola konflik secara damai <p>2. Memantau atau memonitor masalah politik terutama dalam penanganan persoalan publik, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar , TV , internet dan lain lain untuk mengetahui berbagai persoalan-persoalan publik b. Upaya mendapatkan informasi mengenai persoalan-persoalan publik dari kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya pertemuan organisasi siswa, pertemuan desa/BPD, pertemuan wali kota, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintahan baik secara formal ataupun informal, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan suara dalam pemilihan umum b. Membuat petisi c. Melakukan simulasi tentang kegiatan kampanye, pemilu, lobby dan peradilan d. Melakukan pembicaraan /kesaksian dihadapan lembaga publik e. Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain f. Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu

Sumber: Cholisin (2010)

Dari pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *participation skill* (keterampilan partisipasi) meliputi partisipasi warga negara yang berwawasan luas, bertanggung jawab dan efektif dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi , memantau dan mempengaruhi dalam membuat keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.

3. *Civic disposition*

Komponen penting yang ketiga dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah *Civic disposition*. Menurut Raharja dkk (2017:204) *Civic disposition* atau Watak Kewarganegaraan adalah mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting pada pemeliharaan pengembangan demokrasi dan konstitusi, Watak-watak Kewarganegaraan berkembang secara perlahan dari pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dari lingkungan sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*.

Menurut Kalidjernih (Malatuny,2017:61) mengemukakan bahwa *civic disposition* merupakan istilah yang terdapat didalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merujuk pada watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat mengenai *civic disposition* tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa *civic disposition* merupakan watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan dalam memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah, watak-watak kewarganegaraan tersebut berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dari lingkungan sekolah, komunitas serta organisasi-organisasi lainnya.

Menurut Malatuny (2017 : 66) *Civic Disposition* merupakan salah satu ranah yang sangat penting dalam pembentukan keberhasilan warga negara dalam belajar, menurutnya *civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap atau karakter kewarganegaraan dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara serta memajukan kewarganegaraan maupun pemerintahan, Hal ini dapat dikembangkan secara optimal melalui pembelajaran *civic education* pada setiap jenjang pendidikan.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai Peran Mata Kuliah Kewarganegaraan dalam Membentuk Civic Skill Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo, penelitian ini bertempat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berdasarkan observasi dan eksplorasi peneliti menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian Raharja, Legiani dan Wika (2017) yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Warga Negara FKIP UNTIRTA, dalam jurnal Untitra *civic education* Pada penelitian ini membahas tentang peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kompetensi warga negara mahasiswa FKIP Untitra. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan bagus dalam menumbuhkan kompetensi warga negara mahasiswa FKIP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama melihat peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peneliti sebelumnya melihat pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kompetensi warga negara FKIP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengetahui peran mata kuliah Kewarganegaraan dalam membentuk *civic skill* pada mahasiswa
2. Hasil penelitian dari Kosasih (2016) yang berjudul Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan *Civic skill* pada Mahasiswa, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Pada penelitiann ini membahas tentang peran organisasi kemahasiswaan terhadap pengembangan *Civic skill* pada mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah peran organisasi mahasiswa terhadap pengembangan *civic skill* yaitu organisasi mahasiswa sebagai wadah aspirasi mahasiswa dan memacu pola pikiran mahasiswa agar dapat berpikir secara kritis, ilmiah dan bertanggung jawab serta ditemukan juga kendala yang dihadapi organisasi mahasiswa dalam mengembangkan *civic*

skill pada mahasiswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama ingin mengetahui pengembangan atau pembentukan *civic skill* pada mahasiswa. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian sebelumnya mengetahui *civic skill* pada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengetahui *civic skill* pada mahasiswa melalui mata kuliah Kewarganegaraan.

3. Penelitian dari Cholishin dengan judul Penerapan *Civic Skill* dan *Civic Dispositions* dalam Mata Kuliah Prodi Pkn (2010) yang disampaikan dalam diskusi terbatas jurusan Pkn dan Hukum FISE, Universitas Negeri Yogyakarta. Dari penelitian ini keterampilan kewarganegaraan/*Civic skill* dan Karakter kewarganegaraan / *civic dispositions* merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama ingin mengetahui tentang *civic skill* / Keterampilan kewarganegaraan.

